

Efektivitas Pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi pada Petani Padi Desa Tinggar Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan Jawa Barat

Effectiveness of the Subsidized Fertilizer Program Implementation for Rice Farmers in Tinggar Village, Kadugede District, Kuningan Regency, West Java

Ratu Ghassani*, Dika Supyandi

Universitas Padjadjaran
Jalan. Raya Bandung-Sumedang KM. 21, Jawa Barat 45363
*Email: ratghssni@gmail.com
(Diterima 09-06-2024; Disetujui 12-07-2024)

ABSTRAK

Pupuk subsidi merupakan program bantuan dari pemerintah dalam rangka membantu petani untuk meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan petani untuk membeli pupuk. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti yang dirasakan di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Petani mengeluhkan adanya keterlambatan datangnya pupuk serta jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas program pupuk bersubsidi di Desa Tinggar. Efektivitas program pupuk bersubsidi dapat diukur dengan 6T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap 63 petani padi yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Selanjutnya, data yang didapatkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan diolah menggunakan rumus pengukuran tingkat efektivitas dalam bentuk Persentase dan hasil perhitungan diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan kategori indikator efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program pupuk bersubsidi di Desa Tinggar dikategorikan cukup efektif.

Kata kunci: petani padi, efektivitas pupuk bersubsidi

ABSTRACT

Subsidized fertilizer is a government assistance program aimed at helping farmers reduce the costs associated with purchasing fertilizer. However, implementation issues have arisen, as experienced in Tinggar Village, Kadugede District, Kuningan Regency, West Java. Farmers have complained about delays in fertilizer delivery and insufficient quantities. Therefore, this study was conducted to measure the effectiveness of the subsidized fertilizer program in Tinggar Village. The effectiveness can be measured using the 6T criteria: the right type, the right amount, the right price, the right place, the right time, and the right quality. This research uses a quantitative method, was using interviews and questionnaires distributed to 63 rice farmers receiving subsidized fertilizer. The collected data were analyzed using descriptive analysis and processed using an effectiveness measurement formula in percentage form. The results were then classified according to the effectiveness indicator categories. The study's findings that the effectiveness of the subsidized fertilizer program in Tinggar Village is categorized as quite effective.

Keywords: rice farmers, effectiveness of subsidized fertilizer

PENDAHULUAN

Pada proses budidaya pertanian, penggunaan pupuk memiliki peran yang sangat penting. Tanpa adanya pupuk, hasil usahatani tidak akan mencapai harapan karena produksi tanaman tidak akan sesuai dengan yang diinginkan oleh petani, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada tingkat pendapatan petani. Maka dari itu, untuk mencapai keberhasilan dalam budidaya tanaman, diperlukan suatu upaya yang didukung oleh sarana dan prasarana produksi pertanian yang memadai.

Pupuk merupakan sumber nutrisi tambahan yang memberikan unsur-unsur esensial, seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk menjadi aspek yang penting. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pupuk dalam jumlah yang memadai, dengan kualitas yang terjamin, dan harga yang terjangkau bagi petani. Upaya ini menjadi strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan pada akhirnya mencapai ketahanan pangan secara nasional (Sularno, dkk., 2017).

Subsidi dalam sektor pertanian merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memberikan dukungan ekonomi kepada petani dan masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Subsidi diartikan sebagai bentuk bantuan pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan memotong sebagian dari harga suatu barang atau jasa yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok tertentu, diberikan dalam rangka memberi manfaat khususnya pada sektor pertanian. Salah satu bentuk subsidi yang diberikan pemerintah di sektor pertanian adalah subsidi pupuk.

Aturan mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013. Namun pada tahun 2022, pemerintah mengganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022. Perubahan ini mengenai Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan terkait pendistribusian pupuk subsidi bagi petani. Peraturan ini memfokuskan pada dua jenis pupuk, yaitu Urea dan NPK, agar lebih tepat dan efisien. Sebelumnya, pupuk subsidi menysasar 70 komoditas pertanian, namun dengan perubahan ini, hanya 9 komoditas utama yang menjadi sasaran. Perubahan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam distribusi pupuk bersubsidi. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022, pupuk bersubsidi saat ini difokuskan pada sembilan komoditas pertanian strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi. Pemilihan komoditas ini didasarkan pada dampaknya terhadap inflasi dan strategisitasnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Valeriana Darwis dan Supriyati (2013), pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk masih terdapat berbagai kendala. Dalam pelaksanaannya, terlihat beberapa permasalahan, antara lain kelangkaan pupuk di beberapa daerah sentra pertanian, praktik penyelundupan pupuk ke luar negeri, kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta perembesan pupuk bersubsidi ke pasar non-subsidi dan antarwilayah.

Menurut Jamilatun, dkk (2021), kelangkaan pada pupuk yang diikuti dengan kenaikan harga pupuk akan mempengaruhi penyediaan pupuk bagi para petani setiap tahun karena pupuk merupakan kebutuhan utama usahatani sehingga apabila harga pupuk mahal, petani tetap akan membeli pupuk tersebut, sehingga berdampak pada tingkat pemakaian pupuk di tingkat usahatani. Jika pupuk bersubsidi terjadi hal tersebut, petani akan mengalami penurunan pendapatan karena harus membeli pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga biaya produksi naik. Selain berdampak pada kehidupan sosial ekonomi petani, kebijakan subsidi pupuk yang belum berjalan optimal juga dapat mengakibatkan tidak tercapainya prinsip tepat pupuk, seperti tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Menurut Kholis dan Khasan Setiaji (2020), subsidi pupuk berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, terutama pada tanaman pangan seperti padi. Usahatani padi sangat bergantung kepada kondisi lingkungan dan input yang digunakan, termasuk pupuk. Pupuk memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan usahatani padi, karena tanpa adanya pupuk, hasil produksi padi tidak akan mencapai potensi maksimal.

Pada tahun 2023, pemerintah telah menyalurkan pupuk subsidi sebesar 7,85 juta ton, namun permasalahan mengenai distribusi pupuk subsidi masih menjadi keluhan para petani. Hal tersebut sesuai dengan yang ditemukan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dilansir dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kuningan (DKPP) per September 2023, stok dan ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Kuningan tidak mengalami kelangkaan, karena penyerapan pupuk subsidi oleh petani masih kurang yaitu sebesar 55%. Terdapat kendala juga dalam pembelian pupuk subsidi, seperti masalah pada kartu tani, pagu alokasi pupuk yang lebih rendah dari dosis anjuran, pembatasan jenis pupuk bersubsidi hanya pada urea dan NPK, serta pembatasan jenis komoditas pada sembilan jenis saja dan luas lahan maksimal 2 hektar per petani.

Desa Tinggar merupakan salah satu desa yang memproduksi padi di Kabupaten Kuningan. Dalam melaksanakan kegiatan pertanian di Desa Tinggar, para petani padi menghadapi sejumlah kendala, seperti terkait ketersediaan jumlah pupuk yang dianggap kurang memadai untuk mendukung kegiatan budidayanya. Para petani merasa bahwa alokasi jumlah pupuk subsidi yang diterima tidak selalu mencukupi untuk kebutuhan optimal dalam proses pertanian.

Selain itu, kendala lain yang diungkapkan oleh para petani adalah terkait dengan waktu pengadaan pupuk subsidi yaitu seringkali pupuk tersebut tidak tersedia tepat waktu sesuai dengan jadwal

penanaman atau fase pertumbuhan tanaman. Keterlambatan dalam distribusi pupuk subsidi dapat berdampak negatif pada kinerja pertanian dan menghambat pencapaian hasil yang diharapkan.

Menurut Rigi dkk (2019), efektivitas secara umum digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu kegiatan. Efektivitas dapat diukur lewat suatu monitoring atau evaluasi. Kendala-kendala yang terdapat di Desa Tinggar tersebut menjadi perhatian penting dalam evaluasi efektivitas pelaksanaan program pupuk bersubsidi. Dengan memahami kendala-kendala tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pupuk bersubsidi secara lebih optimal, memberikan dampak positif bagi petani, dan mendukung hasil pertanian yang lebih baik. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, penting untuk mengukur tingkat efektivitas. Efektivitas subsidi pupuk dapat diukur melalui enam indikator, yaitu tepat tempat, jenis, jumlah, mutu, waktu, dan harga pupuk, karena dampak kurang efektifnya program pupuk bersubsidi di Desa Tinggar dapat langsung dirasakan oleh petani dan berpotensi merugikan ketahanan pangan dalam lingkup lokal. Maka dari itu, kajian terkait efektivitas pelaksanaan program pupuk bersubsidi dan pelaksanaan program pupuk bersubsidi pada petani padi Desa Tinggar Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan perlu untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah efektivitas program pupuk bersubsidi pada petani padi di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena Desa Tinggar merupakan salah satu dari 12 desa di Kecamatan Kadugede yang aktif dalam produksi padi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Kadugede memiliki peran dalam produksi padi di wilayah Kabupaten Kuningan. Selain itu, Desa Tinggar dipilih karena hasil wawancara dengan instansi terkait menunjukkan adanya masalah dalam pendistribusian pupuk subsidi yang tidak merata di desa tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pupuk subsidi di Desa tersebut. Data yang diambil yaitu menggunakan kuesioner dan wawancara langsung kepada responden dan hasil diolah secara deskriptif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara kuantitatif, menggunakan sampel yang diambil yaitu 172 populasi petani padi sawah di Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, khususnya di Desa Tinggar yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Sampel yang didapatkan adalah sebanyak 63 petani.

Selanjutnya, data diambil menggunakan kuesioner dan wawancara langsung kepada responden dan hasil dianalisis secara deskriptif. Tujuan analisis ini adalah untuk mendeskripsikan seberapa tingkat efektivitas pelaksanaan pupuk subsidi pada petani padi di Desa Tinggar dengan menggunakan rumus dan kriteria tingkat efektivitas pupuk bersubsidi yang terdiri dari tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu. Adapun kriteria dan rumus dari efektivitas program pupuk bersubsidi pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Kriteria dan Rumus Indikator Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi

No	Indikator	Kriteria
1	Tepat Harga	1. Petani memperoleh pupuk subsidi dengan harga yang ditetapkan (HET): <ul style="list-style-type: none"> • Urea Rp. 2,250/kg • NPK Rp. 2.300/kg
2	Tepat Jumlah	1. Pupuk subsidi meringankan biaya usahatani para petani 1. Petani menerapkan dosis ideal pupuk untuk satu musim tanam: <ul style="list-style-type: none"> • Urea 250 kg/ha • NPK 250kg/ha 2. Petani melakukan pemupukan 2 kali sesuai dengan dosis per musim tanam 3. Kesesuaian antara penerimaan oleh petani dengan jumlah RDKK
3	Tepat tempat	1. Petani memperoleh pupuk subsidi dari pengecer atau kios yang resmi. 2. Petani memperoleh pupuk dari pengecer yang berlokasi di Kecamatan yang sama
4	Tepat waktu	Tidak ada keterlambatan dalam distribusi pupuk saat petani melakukan pemupukan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
5	Tepat jenis	Petani menggunakan jenis pupuk yang sesuai anjuran (Urea dan NPK)
6	Tepat Mutu	Petani menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan

Tabel 2. Rumus Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi

<p>1. Tepat Harga</p> $\Delta P = Pr - Pp$ <p>Keterangan:</p> <p>ΔP: Perbedaan harga (Rp)</p> <p>Pr: Harga yang diterima responden (Rp)</p> <p>Pp: Harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah (Rp)</p> <p>Setelah mengetahui selesih harga, indikator tepat harga dihitung dengan:</p> $\text{Ketepatan harga} = \frac{nh}{N} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>nh: Jumlah responden yang memperoleh pupuk sesuai HET</p> <p>N: Jumlah responden petani di Desa Tinggar Kecamatan Kadugede</p>	<p>2. Tepat Tempat</p> $\text{Ketepatan Harga} = \frac{nh}{N} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>nt: Jumlah responden yang memperoleh mendapatkan pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi sesuai RDKK</p> <p>N: Jumlah responden petani di Desa Tinggar Kecamatan Kadugede</p>
<p>3. Tepat Waktu</p> $\text{Ketepatan Waktu} = \frac{nw}{N} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>nh: Jumlah responden yang berpendapat pupuk tersedia saat dibutuhkan (orang)</p> <p>N: Jumlah responden petani di Desa Tinggar Kecamatan Kadugede</p>	<p>4. Tepat Jumlah</p> $\Delta Q = Qr - Qp$ <p>Keterangan:</p> <p>ΔQ: Perbedaan jumlah (kg/ha)</p> <p>Qr: Jumlah pupuk yang digunakan oleh para petani (kg/ha)</p> <p>Qp: Jumlah pupuk yang disarankan oleh pemerintah (kg/ha)</p> $\text{Ketepatan Jumlah} = \frac{nw}{N} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>nj: Jumlah responden jenis pupuk bersubsidi sesuai jumlah (orang)</p> <p>N: Jumlah responden petani di Desa Tinggar Kecamatan Kadugede</p>
<p>5. Tepat Jenis</p> $\text{Ketepatan Jenis} = \frac{nje}{N} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>nje: Jumlah responden jenis pupuk subsidi yang sesuai kebutuhan petani (orang)</p> <p>N: Jumlah responden petani di Desa Tinggar Kecamatan Kadugede</p>	<p>6. Tepat Mutu</p> $\text{Ketepatan Mutu} = \frac{nje}{N} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>nm: Jumlah responden jenis pupuk bersubsidi sesuai SNI (orang)</p> <p>N: Jumlah responden petani di Desa Tinggar Kecamatan Kadugede</p>

Sumber: Khlois dan Khasan Setiaji (2020)

Setelah menghitung efektivitas dari enam indikator, maka dapat dihitung efektivitas secara keseluruhan dengan menggunakan rumus Persentase:

$$\text{Efektivitas} = \frac{nh + nt + nw + nj + nje + nm}{6} \times 100\%$$

Keterangan:

Nh : ketepatan harga (%)

Nt : ketepatan tempat (%)

Nw : ketepatan waktu (%)

Nj : ketepatan jumlah (%)

nJ : ketepatan jenis (%)

nm : ketepatan mutu (%)

Selanjutnya dilakukan tingkat pengukuran efektivitas sesuai dengan klasifikasi kategori nilai efektivitas. Adapun rasio nilai efektivitas menurut Budani (2009) dalam Khlois dan Khasan Setiaji (2020) klasifikasi menurut acuan litbang Depdagri sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Tingkat Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Tingkat Capaian
0 – 39,99	Sangat Tidak Efektif
40% – 59,99	Tidak Efektif
60% – 79,99	Cukup Efektif
80% – 100	Sangat Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi di Desa Tinggar Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan

1. Tepat Harga

Menurut Adiraputra dan Supyandi (2021), indikator tepat harga adalah yang paling penting karena keberhasilan program pupuk bersubsidi sangat bergantung pada harga. Program ini bertujuan agar petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Adapun perbandingan biaya antara pupuk bersubsidi sesuai HET dengan pupuk nonsubsidi di Desa Tinggar:

Tabel 4. Perbandingan Biaya antara Pupuk Subsidi dan Pupuk Nonsubsidi

No	Jenis Pupuk	Penggunaan Pupuk Anjuran Pemerintah (Kg/ha)	Harga Pupuk Bersubsidi (Rp/kg)	Harga Pupuk Nonsubsidi (Rp/kg)
1	Urea	250	2250	7600
2	NPK	250	2300	2600
Total Harga			1.137.500	2.550.000
Selisih Harga Pupuk Subsidi dan Nonsubsidi			1.412.500	

Sumber: Data primer, diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4, Desa Tinggar menggunakan dosis spesifik 250 kg/ha untuk pupuk urea dan 250 kg/ha untuk pupuk NPK. Jika petani menggunakan pupuk subsidi untuk satu hektar sawah, biaya yang harus dibayar adalah Rp1.137.500. Namun, jika menggunakan pupuk non-subsidi, biayanya mencapai Rp2.550.000. Selisihnya cukup besar, yaitu Rp1.412.500, sehingga petani harus membayar 242% lebih mahal untuk pupuk non-subsidi. Adapun tabel mengenai rata-rata harga pembelian pupuk di Desa Tinggar:

Tabel 5. Rata-Rata Harga Pembelian Pupuk di Desa Tinggar

No	Uraian	Urea	NPK
1	Harga Pembelian pupuk rata-rata (Rp/kg)	3.000	3.000
2	Harga yang seharusnya (HET) (Rp/kg)	2.250	2.300
Selisih		750	700

Sumber: Data primer, diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 5, harga rata-rata pupuk bersubsidi di Desa Tinggar tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Petani membayar Rp3.000/kg untuk pupuk urea bersubsidi, padahal HET-nya adalah Rp2.250/kg, sehingga ada selisih Rp750/kg. Untuk pupuk NPK bersubsidi, petani juga membayar Rp3.000/kg, sedangkan HET-nya adalah Rp2.250/kg, dengan

selisih Rp750/kg. Kenaikan harga ini terjadi karena ketentuan dari kios, tanpa penjelasan lebih lanjut menurut wawancara dengan penyuluh.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Putra (2020) di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat menemukan perbedaan harga antara harga aktual dan HET. Petani seharusnya membayar Rp1.800/kg untuk urea dan Rp 2.300/kg untuk NPK sesuai HET. Namun, di kios-kios, harga yang harus dibayar adalah Rp2.300/kg untuk urea dan Rp2.700/kg untuk NPK, sehingga terdapat selisih harga Rp500 untuk urea dan Rp 400 untuk NPK, yang berarti petani membeli pupuk subsidi di atas HET. Adapun tabel yang menunjukkan Persentase indikator tepat harga di Desa Tinggar:

Tabel 6. Persentase Indikator Tepat Harga

No	Ketepatan Harga	Jumlah (responden)	Persentase (%)
1	Sesuai	53	84
2	Tidak sesuai	10	16
Jumlah		63	100

Sumber: Data primer, diolah (2024)

Sebanyak 84% petani di Desa Tinggar menyatakan bahwa harga pupuk sudah sesuai dengan harga yang ditetapkan, ini karena sebagian besar petani tidak mengetahui informasi atau aturan HET. Namun, sebagian kecil yang mengetahui HET merasa harga pupuk masih belum sesuai dan berharap harga pupuk bersubsidi bisa diturunkan lagi. Penelitian ini sejalan dengan temuan Adiraputra dan Supyandi (2020) yang menunjukkan bahwa petani seringkali tidak mengetahui HET dan menerima harga yang ditetapkan oleh kios, menganggap harga tersebut sudah sesuai dengan harapan petani.

2. Tepat Tempat

Indikator tepat tempat menunjukkan bahwa petani membeli pupuk subsidi di tempat atau kios resmi yang telah ditunjuk oleh distributor pupuk untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke daerah tersebut. Hasil penelitian untuk indikator tepat tempat dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Persentase Indikator Tepat Tempat

No	Tempat Pembelian	Jumlah (responden)	Persentase (%)
1	Kios/Pengecer resmi	63	100
2	Bukan kios/pengecer resmi	0	0
Jumlah		63	100

Sumber: Data primer, diolah (2024)

Berdasarkan data Tabel 7, semua responden di Desa Tinggar membeli pupuk bersubsidi di kios resmi yang ditunjuk oleh distributor, yaitu kios Tani Subur di Desa Kadugede. Meskipun kios tersebut berada di luar Desa Tinggar, mayoritas petani merasa jaraknya dekat. Kios ini melayani enam desa yaitu Desa Ciherang, Desa Cisukadana, Desa Windujanten, Desa Cipondok, dan Desa Babatan, dan termasuk Desa Tinggar. Para petani tidak mengeluhkan jarak, namun beberapa masih berharap adanya kios resmi di dalam Desa Tinggar untuk memudahkan akses. Indikator tepat tempat terpenuhi karena 100% responden membeli pupuk di kios resmi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Nugroho dkk (2018) di Kabupaten Bantul, yang menemukan bahwa hanya 61,90% petani mendapatkan pupuk di tempat yang tepat. Banyak petani masih membeli di kios tidak resmi karena jarak ke kios resmi yang jauh, keterlambatan ketersediaan pupuk bersubsidi di kios resmi, dan keterbatasan stok di kios resmi.

3. Tepat Waktu

Indikator tepat waktu mengukur apakah petani menerima pupuk sesuai dengan siklus pertumbuhan tanaman. Artinya, pupuk bersubsidi harus tersedia di kios tepat saat dibutuhkan. Tabel berikut menunjukkan persentase petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai jadwal.

Tabel 8. Persentase Indikator Tepat Waktu

No	Ketepatan Waktu	Jumlah (responden)	Persentase (%)
1	Sesuai	13	21
2	Tidak sesuai	50	79
Jumlah		63	100

Sumber: Data primer, diolah (2024)

Analisis Tabel 8. menunjukkan bahwa hanya 21% petani yang merasa pupuk bersubsidi tersedia sesuai kebutuhan, menandakan sebagian besar petani kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu untuk produksi padi. Wawancara mengungkapkan sering terjadi kelangkaan pupuk, memaksa petani menunggu 1-2 minggu untuk mendapatkannya. Ini menunjukkan efektivitas pupuk bersubsidi dalam memenuhi indikator tepat waktu di Desa Tinggar rendah. Saat menghadapi kelangkaan, petani sering merasakan kepanikan tetapi para petani memiliki alternatif lain seperti menggunakan pupuk kandang, pupuk organik, obat semprot, menunda pemupukan, atau membeli pupuk non-subsidi yang lebih mahal.

Petani di Desa Tinggar menggunakan 10 karung pupuk kandang per musim tanam, dengan biaya Rp10.000 per karung, kecuali jika para petani memiliki ternak sendiri. Penggunaan pupuk kandang menggantikan kebutuhan pupuk urea dan NPK. Selain itu, para petani juga menggunakan pupuk semprot organik yang harganya lebih mahal, Rp20.000 per botol.

Petani di Desa Tinggar biasanya membeli pupuk subsidi menjelang musim tanam untuk menghitung kebutuhan produksi, tetapi beberapa membeli sebelumnya untuk mengantisipasi kelangkaan. Terkadang masih terdapat sisa pupuk dari musim tanam sebelumnya karena beberapa petani tidak menebus jatah pada musim kedua yang merupakan musim kemarau. Namun, kualitas pupuk sering cepat rusak.

Penelitian ini sejalan dengan Kautsar dkk (2020) yang menemukan kelangkaan pupuk subsidi di Kecamatan Montasik karena keterlambatan penyaluran, menyebabkan penundaan 2-3 minggu dan menghambat pertumbuhan padi. Selain penelitian di Kecamatan Montasik, penelitian di Desa Pattinoang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar menemukan masalah serupa. Menurut Sakiah dkk (2022), petani di Desa Pattinoang harus menunggu 10-15 hari untuk mendapatkan pupuk, yang menyebabkan penundaan penanaman padi dan tidak sesuai dengan musim tanam. Keterlambatan ini berdampak negatif pada produksi padi, karena pupuk sangat penting untuk meningkatkan hasil panen. Semakin baik kualitas pupuk dan semakin tepat waktu pemberiannya, semakin tinggi dan baik hasil produksinya.

4. Tepat Jumlah

Indikator tepat jumlah berarti pupuk bersubsidi digunakan sesuai dengan aturan pemerintah dan petani menerima pupuk sesuai dengan data yang diajukan dalam RDKK. Anjuran pemerintah dalam e-RDKK tahun 2024 menyebutkan penggunaan urea sebanyak 250-300 kg/ha dan NPK sebanyak 250 kg/ha. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan rata-rata pupuk yang dianjurkan dengan yang digunakan oleh petani, seperti terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Rata-rata dan Selisih Jumlah Pupuk Bersubsidi di Desa Tinggar 2024

No	Uraian	Urea	NPK
1	Jumlah pupuk yang dibutuhkan sesuai RDKK (kg/tahun)	20.313	18.531
2	Jumlah pupuk yang diterima (kg/tahun)	10.710	5.382
3	Selisih	9.603	13.149

Sumber: Data primer, diolah (2024)

Dari Tabel 9. terdapat selisih besar antara jumlah pupuk yang diajukan oleh petani dalam RDKK dan realisasi penerimaan pupuk subsidi di Desa Tinggar. Selisih untuk pupuk urea adalah 9.603 kg/tahun dan untuk NPK adalah 13.149 kg/tahun. Pada 2024, Desa Tinggar mengajukan 20.313 kg/tahun pupuk urea tetapi hanya menerima 10.710 kg/tahun. Untuk NPK, pengajuan adalah 18.531 kg/tahun namun penerimaan hanya 5.382 kg/tahun.

Di Desa Tinggar, pengajuan RDKK dilakukan berdasarkan luas lahan petani sesuai ketentuan Dinas Pertanian setempat. Namun, kenyataannya, pupuk subsidi yang diterima sering tidak sesuai dengan pengajuan RDKK. Meskipun petani memiliki kartu tani yang memuat informasi RDKK dan kuota sesuai luas lahan, distribusi pupuk subsidi masih kurang mencukupi kebutuhan. Selain itu, beberapa petani mengalami kehilangan atau kerusakan kartu tani, sehingga tidak bisa digunakan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Ramlayana (2020) di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, di mana sistem pengajuan RDKK yang diberlakukan sudah sesuai ketentuan Dinas Pertanian dan efektif dalam pelaksanaannya, sehingga petani menerima pupuk sesuai kebutuhan. Namun, di Desa Tinggar, meskipun pengajuan RDKK sesuai aturan, jumlah pupuk yang diterima

tidak mencukupi. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan antara kebutuhan di lapangan dan alokasi anggaran pemerintah. Tingkat efektivitas tepat jumlah di Desa Tinggar dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Persentase Indikator Tepat Jumlah

No	Ketepatan Jumlah	Jumlah (responden)	Persentase (%)
1	Sesuai	29	46
2	Tidak sesuai	34	54
Jumlah		63	100

Sumber: Data primer, diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 10. hanya 46% petani di Desa Tinggar yang menerima pupuk sesuai dosis anjuran, sehingga mayoritas petani mengalami kekurangan nutrisi untuk tanaman padi yang ditanam karena keterbatasan jumlah pupuk bersubsidi. Hal ini serupa dengan penelitian Adiraputra dan Supyandi (2020) di Desa Sukaasih, Kabupaten Bekasi, di mana alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah tidak sesuai dengan RDKK yang diajukan pada tahun 2020, menyebabkan kekurangan hingga Oktober 2020.

5. Tepat Jenis

Indikator tepat jenis berarti pupuk yang diterima oleh petani sesuai dengan kebutuhan, yaitu NPK dan Urea. Persentase efektivitas indikator tepat jenis dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Persentase Indikator Tepat Jenis

No	Ketepatan Jenis	Jumlah (responden)	Persentase (%)
1	Sesuai	60	95
2	Tidak sesuai	3	5
Jumlah		63	100

Sumber: Data primer, diolah (2024)

Dapat disimpulkan bahwa 95% petani di Desa Tinggar menerima pupuk sesuai dengan jenis yang diperlukan, yaitu NPK dan Urea. Namun, jika tidak mendapatkan pupuk yang dibutuhkan, para petani membeli pupuk non-subsidi atau menggunakan pupuk kandang dan semprot. Temuan ini berbeda dengan penelitian Rusydiana dan Retnoningsih (2016) di Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang menunjukkan efektivitas indikator tepat jenis hanya sebesar 45.71%. Di Desa Ampeldento, petani menyatakan bahwa jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah sudah cukup sesuai dengan kebutuhan tanaman padi. Adapun dampak yang akan dirasakan petani apabila adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Menurut Maulia dkk (2023), kelangkaan ini menurunkan pendapatan petani karena mereka harus membeli pupuk non-subsidi yang mahal, membutuhkan modal lebih besar. Tidak semua petani mampu membeli pupuk mahal, sehingga mereka beralih ke pupuk kandang. Namun, pupuk kandang memiliki kekurangan seperti waktu pengolahan yang lama, penyerapan nutrisi yang lambat oleh tanaman, dan kandungan unsur hara yang tidak selengkap pupuk NPK dan Urea.

6. Tepat Mutu

Indikator tepat mutu berarti pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan SNI, yang dapat dilihat dari label kemasan, berat, dan warna. Hasil penelitian untuk indikator tepat mutu dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Persentase Indikator Tepat Mutu

No	Ketepatan Mutu	Jumlah (responden)	Persentase (%)
1	Sesuai SNI	63	100
2	Tidak sesuai SNI	0	0
Jumlah		63	100

Sumber: Data primer, diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 12, semua petani di Desa Tinggar menyatakan bahwa pupuk subsidi yang diterima sudah sesuai dengan mutu atau standar yang ditetapkan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pupuk yang disalurkan telah memenuhi harapan para petani dalam hal kualitas dan kemungkinan besar memberikan hasil yang memuaskan untuk produksi pertanian di Desa Tinggar. Penelitian ini sejalan dengan Khoerul (2021) di Purwokerto Timur, yang menunjukkan bahwa semua responden membeli pupuk bersubsidi dengan logo SNI, menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi karena petani membeli pupuk dari pengecer resmi sehingga pupuk bersertifikat SNI.

7. Efektivitas Keseluruhan Program Pupuk Subsidi di Desa Tinggar

Setelah masing-masing indikator dihitung, selanjutnya adalah menghitung rata-rata efektivitas keseluruhan dari program pupuk subsidi di Desa Tinggar dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{nh + nt + nw + nj + nje + nm}{6} \times 100\%$$

Keterangan:

nh : ketepatan harga (%)

nt : ketepatan tempat (%)

nw : ketepatan waktu (%)

nj : ketepatan jumlah (%)

nje : ketepatan jenis (%)

nm : ketepatan mutu (%)

Selanjutnya dilakukan tingkat pengukuran efektivitas sesuai dengan klasifikasi kategori nilai efektivitas. Maka dari itu, didapatkan rata-rata efektivitas pelaksanaan program pupuk bersubsidi, dengan perhitungan:

Tabel 13. Indikator Tingkat Efektivitas Pupuk Bersubsidi Desa Tinggar

No	Tingkat Efektivitas	Persentase (%)
1	Tepat Harga (nh)	84
2	Tepat Waktu (nw)	21
3	Tepat Jumlah (nj)	46
4	Tepat Tempat (nt)	100
5	Tepat Mutu (nm)	100
6	Tepat Jenis (nje)	95

Sumber: Data primer, diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 13. indikator efektivitas pupuk bersubsidi di Desa Tinggar untuk indikator tepat tempat (nt) dan tempat mutu (nm) adalah yang tertinggi yaitu 100%, lalu tepat jenis (nje) yaitu 95%, tepat harga (nh) 84%, tepat jumlah (nj) 46%, dan tepat waktu adalah indikator yang terkecil yaitu 21%. Sehingga, didapatkan efektivitas keseluruhan pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Desa Tinggar adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Keseluruhan} &= \frac{nh + nt + nw + nj + nje + nm}{6} \times 100\% \\ &= \frac{84 + 100 + 21 + 46 + 95 + 100}{6} \times 100\% \\ &= \frac{446}{6} \times 100\% = 74,3 \approx 74\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, rata-rata efektivitas program pupuk bersubsidi di Desa Tinggar adalah 74%, yang termasuk kategori cukup efektif menurut acuan litbang Depdagri. Dalam penelitian ini, tepat waktu memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas keseluruhan program di Desa Tinggar, dengan persentase hanya 21%. Ini dipengaruhi seringnya terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, membuat petani harus menunggu satu hingga dua minggu untuk mendapatkannya, sehingga indikator tepat waktu dinilai tidak efektif. Selain itu, tepat jumlah juga memiliki pengaruh yang besar juga dengan persentase 46%, karena pupuk subsidi yang diterima seringkali kurang dari pengajuan RDKK. Meskipun petani memiliki kartu tani yang memuat informasi RDKK dan kuota sesuai kebutuhan, jumlah pupuk yang didistribusikan tetap tidak mencukupi, sehingga terkadang petani memakai pupuk kandang dan pupuk semprot organik, hingga petani membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal.

Penelitian ini berbeda dengan Apriyana dkk (2023) di Kecamatan Tonjong, yang menunjukkan efektivitas program pupuk bersubsidi sangat tinggi, mencapai 90,33%. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa petani mudah mendapatkan pupuk bersubsidi jika membelinya tepat waktu dan dari kios resmi, serta sesuai harga dan jumlah yang direncanakan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

KESIMPULAN

Tingkat efektivitas program pupuk bersubsidi di Desa Tinggar termasuk dalam kategori cukup efektif. Dalam penelitian, ditemukan bahwa indikator tepat harga sangat efektif, tepat waktu sangat tidak efektif, tepat jumlah cukup efektif, tepat tempat sangat efektif, tepat mutu sangat efektif, dan tepat jenis sangat efektif. Rendahnya efektivitas indikator tepat waktu disebabkan oleh kelangkaan pupuk yang mengharuskan petani menunda pemupukan, sementara indikator tepat jumlah cukup kecil karena terbatasnya pupuk yang diterima.

Untuk meningkatkan efektivitas program ini, disarankan agar Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (PKPP) tingkat Kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat, seperti membandingkan pengajuan e-RDKK dengan realitas di lapangan. Selain itu, perlu dibuat penjadwalan penerimaan pupuk bersubsidi untuk kios resmi agar petani dapat membeli pupuk subsidi tepat waktu, sehingga pelaksanaan program pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih baik dan petani dapat memperoleh manfaat maksimal dari program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiraputra, P., & Supyandi, D. (2021). Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Di Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Effectiveness Of Fertilizer Subsidies In Sukaasih Village Sukatani District Bekasi Regency. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 594-606.
- Apriyana, M. A., Khatimah, K., & Mudmainah, S. (2023). Efektivitas Penggunaan Kartu Tani Terhadap Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes: The Effectiveness of Using Farmer Cards on The Distribution of Subsidized Fertilizers in Tonjong Sub-district, Brebes Regency. *Jurnal Pertanian Peradaban (Peradaban Journal of Agriculture)*, 3(1), 19-27.
- Darwis, V. (2013). Subsidi pupuk: Kebijakan, pelaksanaan, dan optimalisasi pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), 45-60.
- Jamilatun, S., Suryantini, A., & Astuti, A. (2021). Persepsi Petani Terhadap Pupuk Npk Subsidi Dan Non Subsidi Di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Agritas*, 5(2), 88-100.
- Kautsar, M. R., Sofyan, S., & Makmur, T. (2020). Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Padi (*Oryza sativa*) di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5(1), 97-107.
- Khoerul, A. (2021). Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Kartu Tani Di Purwokerto Timur (Doctoral Dissertation, Iain Purwokerto).
- Kholis, I., & Setiaji, K. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi. *Economic Education Analysis Journal*, 9(2), 503-515.
- Maulia, T., Fathurrahman, R., Claudia, P. C., Sidauruk, T., & Rahmadi, M. T. (2023). Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Untuk Petani Padi (Studi Kasus Dusun VIII Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu). *Journal of Laguna Geography*, 2(1).
- Nugroho, A. D., Siregar, A. P., Andannari, E., Shafiyudin, Y., & Christie, J. I. (2018). Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Agrisociconomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2(1), 70-82.
- Putra, I. W. W. S. (2020). Implementasi kebijakan subsidi pupuk pada petani padi di kecamatan secanggang kabupaten langkat (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Ramlayana, R., Ansari, M. I., & Sudarmi, S. (2020). Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(3), 949-962.

- Rigi, N., Raessi, S., & Azhari, R. (2019). Analisis efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi bagi petani padi di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. *Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Tropis)(JOSETA)*, 1(3).
- Rusydiana, T. (2016). Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Usahatani Padi (*Oryza Sativa*)(Studi Kasus Di Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Sakiah, N., Jumiati, J., & Akbar, A. (2022). Pengaruh Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi Usahatani Padi Sawah Pada Di Desa Pattinoang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 9(3), 877-895.
- Sularno, S., Irawan, B., & Handayani, N. (2017). Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat. *Jurnal Agrosains dan Teknologi*, 1(2), 73-87.